

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA (NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT)

(Studi Kasus Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)

NUR AZIZAH

ABSTRAK

Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, baik potensi ekonomi, pariwisata dan budaya. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang memiliki kemajuan ekonomi dan pariwisata yang sangat pesat. Dengan demikian, Daerah ini dapat mendatangkan banyak wisatawan baik regional maupun internasional. Akibatnya, Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menjadi sangat padat, oleh karena itu, pemerintah daerah Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk membangun bandara baru dan menetapkan lokasi penetapan lahan pembangunan berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan bandara ini, juga merupakan proyek dari MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Setiap kebijakan sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan begitu juga dengan pro dan kontra yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Temon, sebagai warga terdampak dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat keefektifan dari kebijakan tersebut, mengingat implementasi kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan Bandara NYIA merupakan suatu pembangunan yang bersifat mendesak dan diperuntukkan sebagai kepentingan umum.

Kata kunci: dampak sosial ekonomi, pembangunan bandara

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Bandara NYIA merupakan suatu pembangunan yang bersifat mendesak dan diperuntukkan sebagai kepentingan umum. Dengan keadaan yang mendesak tersebut maka keberadaan bandara sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan ekonomi dan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Pada dasarnya, mekanisme pembangunan memang harus terus dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan suatu pelayanan yang berkualitas, terutama di bidang transportasi udara. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan sistem transportasi yang baik dan memadai serta berkesinambungan. Hal ini tentunya akan semakin memudahkan para wisatawan yang berkunjung ke Jogja, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat Yogyakarta secara menyeluruh. Adapun dalam proses ini, setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah, tentunya harus selalu dipahami bahwa, kebijakan publik merupakan suatu proses politik yang bersifat demokratis dan berkeadilan.

Adapun Pembangunan bandara ini dilakukan sebagai relokasi bandara Adisucipto yang mengalami *overload*. Kemampuan kapasitas yang dapat ditampung bandara ini hanya 1,4 Juta penumpang, namun sampai pada tahun 2016 penumpang semakin meningkat.⁴⁷

Pertentangan terhadap pembangunan ini terus terjadi, antara masyarakat dengan Pemerintah serta PT Angkasa Pura I. Hal ini merupakan bentuk Partisipasi yang dilakukan oleh warga masyarakat Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan Pemerintah DIY dalam rangka menolak proses Pembangunan Bandara (*New Yogyakarta International Airport*) NYIA yang berlokasi di Desa mereka. Melalui organisasi yang disebut juga dengan (WTT/wahana tri tunggal). Mereka secara tegas menolak penggusuran dan perampasan tanah milik mereka. Dengan demikian, dengan berjalannya proses pembebasan lahan yang dilaksanakan pemerintah semakin memicu beberapa aksi dari warga masyarakat yang kontra terhadap keputusan tersebut sehingga konflikpun tersebut terus berlanjut hingga saat ini.

Dalam menganalisis masalah pembebasan lahan tentu sangat memiliki keterkaitan erat dalam bidang keadilan sosial, maka dalam hal ini, pada dasarnya keadilan sosial merupakan suatu masalah universal yang ada manakala rakyat merasa tertindas. Dengan demikian setelah proses pembebasan tanah dilakukan maka, keadilan sosial bukan hanya menjadi tanggungjawab negara dalam mewujudkannya tetapi menjadi tanggung jawab bersama yaitu, Negara, para pelaku ekonomi dan rakyat secara keseluruhan.⁴⁸

Pembangunan bandara ini, juga merupakan proyek dari MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Setiap kebijakan sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan begitu juga dengan pro dan kontra yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Temon, sebagai warga terdampak dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat keefektifan dari kebijakan tersebut, mengingat implementasi kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbagai keputusan pemerintah mengenai berbagai regulasi dan putusan MA, tidak menghentikan warga yang tergabung dalam organisasi WTT untuk tetap mempertahankan lahan pertanahan yang selama ini telah dikelola secara turun-temurun. Factor status tanah tersebut yang menjadi permasalahan masyarakat, hingga memunculkan berbagai protes terhadap pembangunan bandara yang dinilai kurang menguntungkan masyarakat. Selain itu, berbagai permasalahan yang muncul tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan berbagai dampak yang akan dialami oleh masyarakat.

Dengan demikian masalah dampak inilah yang menjadi focus peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak apa saja yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari implementasi kebijakan Pembangunan Bandara tersebut. Selain itu peneliti juga ingin meneliti tentang respon masyarakat terhadap proses pembebasan lahan yang dilaksanakan serta mengetahui bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi berbagai dampak yang dihasilkan terutama pada dampak sosial dan ekonomi. Hal ini menarik untuk diteliti karena proses pembebasan lahan disetiap implementasi kebijakan

⁴⁷ Erfanto Linantung.2017. dalam: <https://ekbis.sindonews.com>

Diakses pada tanggal: 05 Februari 2017. Pukul 13.22WIB

⁴⁸ Achmad, Sodiki. 2013. Politik hukum agraria. jakarta konstitusi press

pembangunan merupakan masalah yang sangat krusial, sehingga sangat rentan untuk memicu timbulnya konflik dan luasnya dampak yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah mekanisme proses tahapan perencanaan pembebasan lahan pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport) di Kecamatan Temon, Kab. Kulon Progo?; Bagaimanakah dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Temon, sebagai akibat dari proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta?; dan Bagaimanakah langkah-langkah pemerintah dalam upaya mengatasi dampak sosial dan ekonomi sebagai akibat dari proses pembebasan lahan untuk pembangunan bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) di Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo? Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis tahapan perencanaan proses pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pembangunan bandara NYIA, Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana dampak sosial dan ekonomi yang di hasilkan sebagai akibat dari proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, dan untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah penting yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat (terdampak) sebagai akibat dari proses pembangunan bandara tersebut.

Landasan teori yang digunakan utamanya adalah kebijakan publik. Bagian awal mencakup definisi kebijakan. Kebijakan (*policy*) merupakan sebuah instrumen pemerintah yang bukan hanya memiliki arti *Government*, dalam artian hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani (*civil society*). Pada intinya kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian, sumber daya alam, financial dan lainnya demi kepentingan publik, yakni penduduk, masyarakat atau warga Negara.⁴⁹

Adapun keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah hendaknya mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat dengan tujuan utama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Frank J. Goodnow dalam bukunya *politics and administration*, menyatakan dua makna penting yaitu:⁵⁰

1. Politik melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan-keinginan negara (*the formulation of the will of the stated.*). hal ini dapat diartikan bahwa, yang dimaksud dalam politik yaitu mengerjakan berbagai kebijaksanaan dengan mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat melalui berbagai peraturan perundang-undangan sehingga kehendak negara dapat berjalan baik dan lancar.
2. Sementara itu administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan negara tersebut (*the execution of the will of the stated*). Dengan demikian hal ini dapat diartikan tentang, bagaimana peran para birokrat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, untuk kepentingan rakyat itu

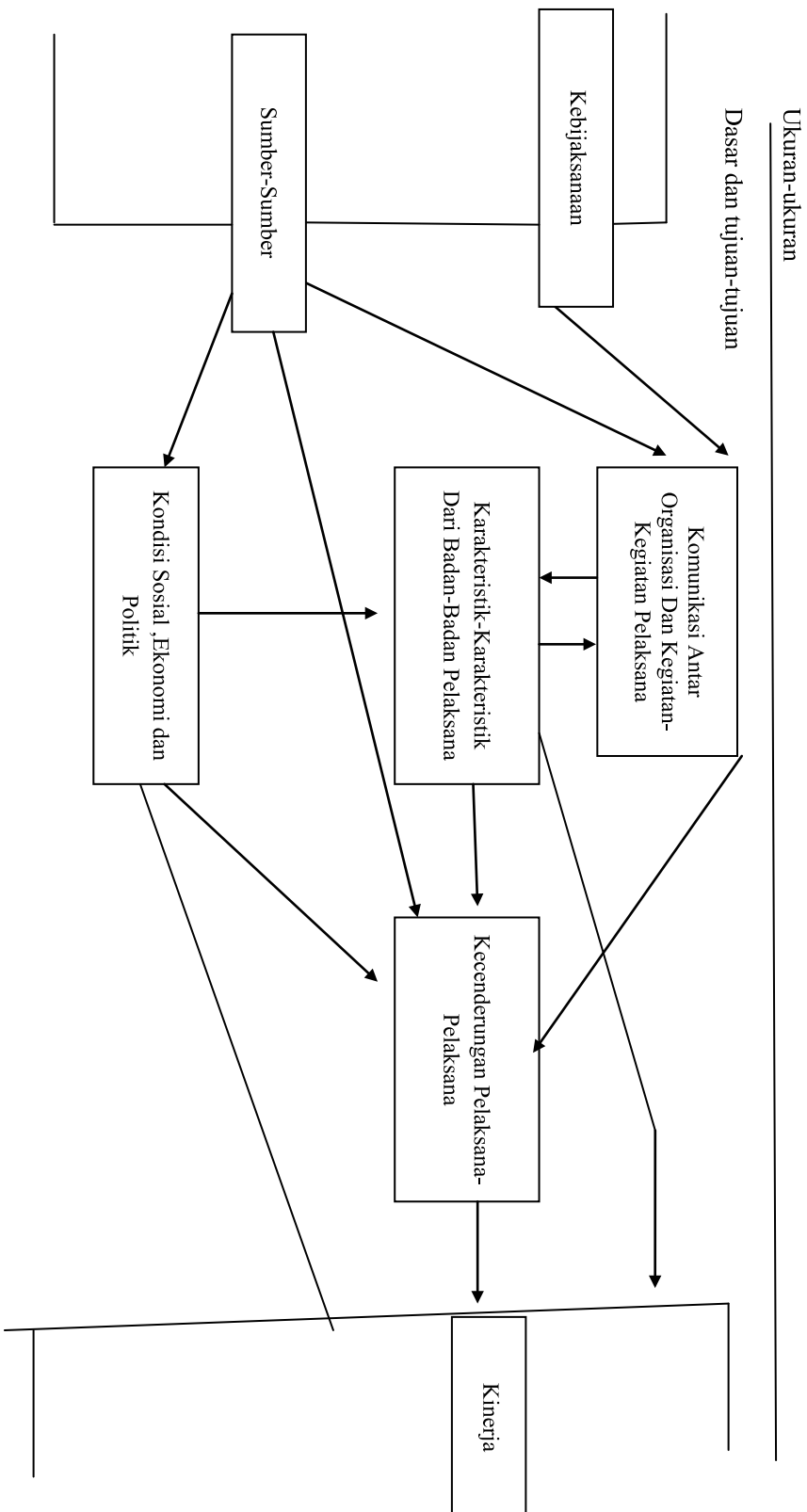
⁴⁹ Mustafa lutfi, lutfi.j.kurniawan.2011.*perihal Negara, hukm dan kebijakan public*.Malang:setara press, (Hal:18-19)

⁵⁰ Inu Kencana Syafiie.2010.Ilmua Administrasi Publik.Jakarta: Rineka Cipta, Hal: 57-58

sendiri. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa setiap unsur penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan haruslah mengedepankan kepentingan rakyat, khususnya dalam upaya implementasi kebijakan pembangunan, terutama pada masalah pembebasan lahan yang tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan masalah keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang memiliki dampak dari keputusan tersebut. Khususnya dalam proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan proses implementasi kebijakan infrastruktur.

2.2 Teori proses Implementasi Kebijakan Publik

Bagan 2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn



B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada.⁵¹ Penelitian ini disebut tipe kualitatif deskriptif karena, penelitian ini mendeskripsikan dampak-dampak sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat terdampak pembangunan bandar udara Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Adapun Penelitian kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik penelitian deskriptif dan struktur fenomena serta peristiwa dalam konteks alaminya.⁵² Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan kerangka penafsiran/teoritis yang dapat membentuk dan mempengaruhi studi tentang permasalahan riset terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial.

Adapun dalam menganalisa permasalahan tersebut, penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian diantaranya: pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian serta analisa data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan, refleksivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian dan kontribusinya pada literature.⁵³

permasalahan Kebijakan pembangunan Bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

C. PEMBAHASAN

Mekanisme Proses Tahapan Perencanaan Pembebasan Lahan Pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport)

Tahapan perencanaan pengadaan tanah

Dalam tahapan pengadaan tanah untuk pembangunna bandara ini terbagi menjadi 4 tahapan diantaranya sebagai berikut:

- 1) tahap perencanaan : dilakukan oleh PT. Angkasa pura I (membuat dokumen perencanaan)
- 2) tahap persiapan : kegiatan tahap persiapan dilaksanakan oleh tim persiapan yang dibentuk oleh Gubernur DIY
- 3) tahap pelaksanaan : dilaksanakan oleh kanwil BPN Provinsi DIY

⁵¹ Arikanto, 2007. *Suharsimi. Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rinekaa Cipta

⁵² Jan, Jonker dkk. 2011. *Metodologi penelitian. panduan untuk master dan Ph.D. Dibidang manajemen*. 2011. Jakarta: Salemba Empat. hal, 71

⁵³ Creswell, Jhohn. 2013. *penelitian kualitatif desain riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal(58-59)

4) tahap penyerahan hasil : hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kepala kanwil bpn prov. Diy selaku ketua pelaksana pengadaan tanah, diserahkan kepada pt. Angkasa pura 1.

Rencana Jadwal Tahapan Persiapan

Dalam rencana Jadwal tahapan persiapan pembangunan bandara ini terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya:

Rencana jadwal tahapan persiapan yang pertama yaitu:

Rencana kegiatan	Jadwal
Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah dari PT Angkasa Pura I diterima oleh Gubernur DIY	Tanggal 25 Agustus 2014
Tim Persiapan dibentuk oleh Gubernur DIY. TUGAS TIM PERSIAPAN : <ul style="list-style-type: none">➤ melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan➤ melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan➤ melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan➤ menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan➤ mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan	Tim Persiapan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY tanggal 5 September 2014
. Tim Persiapan menyampaikan : Pemberitahuan Rencana Pembangunan melalui media massa.	Tanggal 15 September 2014

Sumber: Materi sosialisasi BPN 2014

Rencana Jadwal Tahapan Persiapan Ke Dua

Rencana kegiatan	Jadwal
pendataan awal (30 hari kerja)	minggu pertama Oktober s.d minggu kedua November 2014
Konsultasi Publik (60 hari kerja)	minggu ketiga November s.d minggu keempat Januari 2015
Konsultasi Publik Ulang (jika ada yg keberatan) (30 hari kerja)	Minggu pertama februari s.d. minggu pertama Maret 2015
Jika dalam konsultasi publik ulang msh ada yg keberatan, Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan. Jika keberatan diterima, maka pembangunan Bandara dialihkan. Tetapi jika keberatan ditolak, maka IPL diterbitkan dan pembangunan Bandara berlanjut.	14 hari kerja setelah Tim Kajian Keberatan dibentuk.
Gubernur menetapkan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY	Minggu ketiga April 2015
Izin Penetapan Lokasi yang ditetapkan Gubernur DIY, oleh PT. Angkasa Pura I diserahkan kepada Kepala Kanwil BPN Prov. DIY, sebagai dasar dilaksanakannya Pelaksanaan Pengadaan tanah	dimulai bulan Mei 2015

Sumber: sosialisasi BPN Kulon Progo, 2014

Dalam beberapa tahapan tersebut terdapat penetapan lokasi pembangunan yang kemudian akan dilakukan pembebasan lahan, penetapan lokasi mempunyai beberapa fungsi penting diantaranya, pada Pasal. 1 angka 13 Perpres 71/2012) :

1. Sebagai ijin untuk pengadaan tanah
2. Perubahan penggunaan tanah
3. Peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya setelah proses pengadaan penetapan lokasi dilakukan konsultasi public mengenai beberapa hal penting sebelum pembebasan lahan dilakukan yaitu:

- 1) Pada saat konsultasi publik, pihak yg berhak diharap hadir.
- 2) Jika keberatan dengan pembangunan bandara baru, dapat mengajukan keberatan secara tertulis saat konsultasi publik.
- 3) Format keberatan disediakan oleh tim.

Adapun proses pengadaan lahan untuk pembangunan bandara ini di implementasikan oleh Dinas Pertanahan Nasional, baik di tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Berdasarkan proses tersebut BPN sebagai pihak penyelenggara bekerja berdasarkan pada peraturan UU no 2 tahun 2012 yaitu tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Rusnoto Lembong selaku Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Dan Penilaian Tanah, BPN Kulon Progo, ia menjelaskan bahwa:⁵⁴

“Kebijakan oleh BPN untuk pembebasan lahan megacu pada UU no 2 tahun 2012 yaitu Mulai beberapa tahapan persiapan pelaksanaan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, tahapan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara NYIA dapat di analisis melalui beberapa tahapan diantaranya:

Adapun mengenai tahapan-tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat beberapa tahapan yang perlu dikaji diantaranya adalah

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Karena Keadaan Mendesak.

Pada tahapan ini disusun suatu perencanaan pengadaan tanah, kemudian dilakkan pembebasan lahan dengan melalui beberapa tahapan penting hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widodo selaku (kasubsi fasilitasi pengadaan tanah dan penetapan tanah pemerintah, Kabupaten Kulon Progo) menjelaskan bahwa beberapa peran dinas pertanahan nasional Kulon Progo, mengenai tahapan-tahapan dalam pembebasan lahan diantaranya:⁵⁵

⁵⁴ Hasil wawancara, Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo, 13 Juni 2017, Pukul 09.23WIB Bpk Rusnoto Lembong

⁵⁵ Hasil Wawancara Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo, Pada 12 Juni 2017 Pukul:

Mengingat keberadaan pembangunan bandara NYIA merupakan suatu pembangunan yang sifatnya mendesak karena bandara Adisucipto mengalami overload sehingga perlu diadakan pembangunan bandara baru. Dalam hal ini terdapat beberapa hal penting yaitu:

1. Keadaan yang mendesak
2. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak
3. Penetapan lokasi
4. Pelaksanaan pengadaan tanah
5. Pembangunan.

Persiapan Pengadaan Tanah

Dalam pengadaan tanah perlu melihat beberapa tahapan penting diantaranya:

1. pemberitahuan rencana pembangunan
2. pendataan awal lokasi rencana pembangunan
3. konsultasi publik rencana pembangunan.
4. Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Adapun dalam tahapan persiapan pengadaan tanah tersebut, maka pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak untuk memberitahukan maksud dan tujuan dibangunnya bandara baru yang bernama NYIA. Berikut adalah penjelasan Bapak Agus pranomo sebagai kepala Desa Gelagah terkait dengan proses sosialisasi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

“Pembangunan bandara yag ada di wilayah temon yg mencakup 5 desa gelaghagh, palihan, sindutan, jangkar dan kebon rejo. Bahwa semua tahapan-tahapan oleh tim pelaksana yg dibentuk oleh gubernur dilakukan sesuai oleh UU No 2 tahun 201 . untuk Sosiaisasi awal kemudian pendataan tanah yang berhak, kemudian sosialisasi kembali tentang hak atas tanah kemudian konsultasi public. Dari hasil konsultasi public menunjukkan bahwa 85 % masyarakat setuju”.

Penetapan Lokasi

Dalam hal ini, Penetapan lokasi diputuskan oleh Gubernur DIY. Adapun dalam hal ini terdapat mekanisme keberatan atas penetapan lokasi diantaranya:

1. pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tun paling lama 30 hk sejak dikeluarkannya penetapan lokasi
2. pengadilan tun memutus diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama 30 hk sejak diterimanya gugatan
3. pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan tun, dalam waktu paling lama 14 hk dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung
4. mahkamah agung wajib memberikan putusan dalam waktu 30 hk, sejak permohonan kasasi diterima

Dalam penetapan lokasi, Gubernur memperoleh gugatan dari warga terdampak yang tidak menyetujui adanya pembangunan bandara NYIA. Dengan demikian mereka melakukan gugatan ke PTUN Yogyakarta dikarenakan mereka menganggap lokasi

pembangunan bandara ini tidak sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah yang ada, sehingga setelah melalui proses pengadilan, atas pertimbangan majelis hakim gugatan mereka dikabulkan.

Namun tidak lama setelah adanya putusan hakim PTUN (pengadilan tinggi negeri tata usaha Negara) mengabulkan gugatan masyarakat terdampak yang tergabung dalam organisasi Wahan Tri Tunggal (WTT), pihak provinsi melakukan banding ke MA, dan setelah dikaji dan melalui proses pengadilan maka pihak MA memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pemerintah Provinsi Yogyakarta sehingga ini menjadi dasar atau landasan untuk melanjutkan pembangunan bandara.

Kebijakan pembangunan bandara ini merupakan suatu kebijakan yang bertaraf Nasional yang dilaksanakan di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan ini dilakukan atas dasar keadaan yang mendesak atas kondisi bandara saat ini, tentu kebijakan ini mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk kepentingan umum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, diluar ketidak sepahaman beberapa pihak khususnya masyarakat yang tergabung dalam WTT, mengenai ketidak sesuaian peraturan dan lain sebagainya. Meskipun demikian dalam implementasi kebijakan ini sangat terlihat bahwa terdapat tahapan yang telah dilalui yaitu adanya kringka AMDAL sebelum adanya penetapan IPL (ijin penetapan lokasi). Dengan demikian tentu hal tersebut menjadi masukan kepada pemerintah bahwa setiap implementasi kebijakan khususnya kebijakan pembangunan, sudah seharusnya melalui tahapan yang semestinya yaitu setiap kebijakan pembangunan harus memiliki studi AMDAL terlebih dahulu sebelum penentuan IPL.

Pengadaan Tanah

Dalam proses pengadaan tanah ini, maka masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan jika mereka merasa hasil penilaian tersebut kurang sesuai, adapun masyarakat yang merasa keberatan yang kontra, sehingga solusinya adalah melalui konsinyasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui proses pengadilan. Namun saat ini masyarakat kebanyakan telah menyetujui dan hanya ada beberapa masyarakat saja yang belum menyetujui sehingga mereka harus melalui konsinyasi jika suatu saat mereka setuju maka dapat mengambil uangnya di pengadilan meskipun dengan beberapa peraturan yang telah ditetapkan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Widodo yang mengatakan bahwa pada tahun 2017 ini rata-rata masyarakat yang tergabung dalam kelompok kontra (organisasi wahana tri tunggal) hanya tinggal 10% saja.

Proses Tahapan Ganti rugi

Pada tahapan ganti rugi ini, masyarakat terdampak yang tersebar di 5 Desa yang ada di Kecamatan Temon, hampir secara keseluruhan memilih ganti rugi berupa uang. Hal tersebut dikarenakan lebih efisien dan cepat.

Tahap Pelepasan Hak

Pada tahapan ini, pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat terdampak menjadi sah milik Negara apabila ganti rugi telah diberikan kepada mereka yang berhak. Adapun dalam proses ganti rugi tersebut hampir secara keseluruhan masyarakat terdampak telah menerima keculi bagi mereka yang kontra

terhadap kebijakan ini dan masih melalui proses konsinyasi yang jumlahnya masih $\pm 10\%$. Namun jika sampai pada saat tahapan pembangunan dimulai mereka masih tidak menyetujui maka akan dilakukan eksekusi.

Ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri merupakan ganti rugi yang diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak menyetujui program pembangunan yang dilaksanakan, yang disebut juga dengan proses ganti rugi melalui Konsinyasi.

Penyediaan Lahan Relokasi

Pada tahapan ini pemerintah selaku pelaksana proses pengadaan tanah bertanggung jawab untuk menyediakan tempat relokasi bagi masyarakat terdampak pembangunan bandara NYIA.

Berdasarkan penjelasan dari sebagian masyarakat mereka mengungkapkan bahwa proses penyediaan tanah relokasi yang dilakukan pemerintah terhitung terlambat dari waktu yang seharusnya. Mereka juga berpendapat bahwa harga tanah relokasi terlalu mahal sehingga sedikit memberatkan bagi masyarakat yang membeli tanah relokasi tersebut. Adapun permasalahan lain dalam relokasi juga diungkapkan oleh beberapa warga tanah yang digunakan untuk tempat relokasi belum sepenuhnya siap mislanya seperti penggurukan tanah dan lain sebagainya. Selain itu mereka harus berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya dikarenakan waktu mereka untuk meninggalkan pemukiman mereka sudah semakin dekat.

Adapun, dampak sosial merupakan suatu dampak yang terjadi pada masyarakat yang disebabkan oleh suatu kegiatan tertentu baik berupa dampak social positif maupun negative. Sedangkan dampak ekonomi merupakan bagaimana suatu kegiatan pembangunan dapat menimbulkan berbagai dampak dalam peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat tersebut. Dampak social ekonomi ini sangat penting untuk dikaji, karena dampak yang timbul dari suatu implementasi kebijakan pembangunan merupakan penilaian dari keberhasilan suatu kebijakan pembangunan di suatu daerah. Semakin kecil dampak negative yang dihasilkan maka semakin terlihat bahwa kebijakan tersebut dapat dinilai efektif namun jika dampak yang dihasilkan lebih banyak negative maka, tentunya dampak tersebut harus dikelola oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing instansi.

Dari beberapa penjelasan narasumber dapat disimpulkan bahwa, dari segi dampak ekonomi, rata-rata masyarakat di beberapa desa sebagian ada yang merasa ganti rugi yang diberikan oleh PT. Angkasa Pura sesuai dan sebagian lagi banyak yang merasa ganti rugi yang diberikan terhadap tanah mereka masih kurang sesuai. Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, berdasarkan harga yang diberikan oleh tim penilai atau tim appraisal bagi tanah yang berada di pinggir jalan Provinsi maka rata-rata harganya sangat tinggi tetapi jika tanah yang ada jauh dari jalan raya provinsi maka harganya tidak sama. Dengan demikian tentunya tim penilai atau tim appraisal sudah memiliki kriteria khusus dalam menentukan harga berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu meskipun semua ganti rugi diatas rata-rata harga tanah pada umumnya namun, tidak semua dihargai tinggi ada juga yang beranggapan ganti untung dan ada juga yang merasa ganti rugi yang diberikan hanya sekedar cukup saja, bahkan ada juga masyarakat yang

mengatakan ganti rugi yang didapatkan hanya cukup untuk membeli tempat relokasi sedangkan jika untuk membeli tanah kembali harganya pun sangat tinggi, sehingga sebagian dari masyarakat terdampak tersebut membeli tanah di luar daerah Temon, karena harganya yang masih relative rendah jika dibandingkan harga tanahnya yang ada di Kecamatan Temon.

Adapun dari segi dampak ekonomi yang dihasilkan akibat dari proses pembebasan lahan ini, sebagian dari masyarakat yang memiliki lahan tepi jalan raya Provinsi tentu mendapatkan banyak ganti rugi yang sangat tidak terduga, namun sebagian warga yang memiliki tanah yang letaknya jauh dari jalan raya maka ganti rugi yang didapatkan tidak terlalu banyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat prekonomian meningkat seiring dengan adanya ganti rugi yang memang diatas harga rata-rata.

Dari beberapa pernyataan masyarakat terdampak tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pelatihan-pelatihan memang telah diimplementasikan pemerintah kabupaten terhadap para warga terdampak, namun yang menjadi permasalahan adalah kurang tepat sasaran program dikarenakan pelatihan-pelatihan tersebut tidak memiliki keberlanjutan sehingga peminat untuk mengikuti program pelatihan tersebut tidak banyak. Dengan demikian masyarakat mengharapkan bahwa pemerintah menyediakan akses keberlanjutan untuk pemberdayaan masyarakat terdampak. Misalnya pelatihan tata boga, masyarakat kebanyakan menginginkan pemerintah membantu dalam hal penyediaan tempat-tempat untuk berjualan sehingga apa yang mereka pelajari kemudian dapat diimplementasikan secara efektif, begitu juga dengan pelatihan-pelatihan lainnya.

Pada dasarnya setiap program yang di implementasikan oleh pemerintah untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat terdampak adalah suatu program yang efektif. Namun demikian, memang perlu adanya keberlanjutan dari program-program pelatihan tersebut. Hal itu di butuhkan oleh masyarakat mengingat mereka sangat kebingungan setelah rumah mereka direlokasi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana sector pasar di pemukiman tersebut, selain itu kecemasan lainnya adalah hilangnya mata pencaharian mereka di bidang pertanian, ditambah lagi dengan rumitnya keadaan yang memaksa mereka untuk beralih profesi menjadi non pertanian misalnya di bidang wirasawata ataupun bidang jasa.

Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa, bagi warga yang selama ini berprofesi sebagai petani, hanya mengelola lahan pertanian dan memanen saja, namun saat ini mereka mendapat tuntutan untuk beralih profesi, oleh karena itu banyak masyarakat yang mengalami kebingungan, dalam hal ini mereka membutuhkan waktu untuk proses adaptasi. Dengan demikian diperlukan pendampingan-pendampingan dari pemerintah untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan cara memberikan solusi. Adapun salah satu solusinya yaitu dengan menyediakan tempat bagi mereka untuk berwira usaha.

D. KESIMPULAN

Pembangunan Bandara NYIA merupakan suatu pembangunan yang bersifat mendesak dan diperuntukkan sebagai kepentingan umum. Dalam implementasi kebijakan ini memperoleh pro dan kontra dari masyarakat terdampak. Pro kontra tersebut dikarenakan pembangunan tersebut tidak sesuai berdasarkan peraturan RTRW dan pada tahapan perencanaan serta daerah Kecamatan Temon merupakan daerah yang dinyatakan Rawan terhadap bencana alam tsunami.

Dengan demikian, masyarakat yang tergabung dalam organisasi wahan ri tunggal melakukan gugatan kepada PTUN Yogyakarta mengenai ketidaksetujuan mereka dengan IPL yang dikeluarkan oleh Gubernur, namun tidak lama setelah gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim PTUN Yogyakarta, pemerintah Provinsi mengajukan banding ke MA, setelah itu banding yang diajukan oleh MA berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan demikian keputusan final MA terhadap pengesahan IPL yang dikeluarkan oleh Gubernur menjadi landasan bagi BPN dalam melaksanakan berbagai tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan NYIA.

Dalam hal ini bagaimanapun kebijakan pemerintah mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk kepentingan umum, namun dalam hal ini pemerintah seharusnya memahami mengenai tahapan-tahapan dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum. Salah satu proses yang terlupakan untuk dilalui adalah tahapan AMDAL sebelum IPL dikeluarkan oleh Gubernur, mengingat pentingnya AMDAL bagi dampak positif dan negatif terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selain itu mengenai pembebasan lahan mempunyai dampak sosial dan ekonomi, dampak ekonomi rata-rata masyarakat mengalami peningkatan secara perekonomian hal tersebut dikarenakan ganti rugi yang diberikan PT. Angkasa Pura di atas rata-rata harga sebenarnya, namun hal tersebut hanya sebagian masyarakat yang mempunyai tanah disekitar jalan provinsi yang memang harganya jauh lebih mahal, namun bagi masyarakat yang mempunyai tanah yang letaknya jauh dari jalan provinsi maka tentunya harganya berbeda sehingga mereka hanya merasa cukup saja.

Selain itu dampak sosial yang ditimbulkan diantaranya adalah masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan dan mengalami kecemasan dan kebingungan jika mereka harus beralih profesi di sektor bukan pertanian, sehingga mereka membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini. Selain itu dampak sosial lainnya adalah sifat konsumtif masyarakat yang tidak terhindarkan pada saat ini, tingginya harga tanah disekitar lokasi terdampak dikarenakan imbas dari pembebasan lahan pembangunan NYIA ini. Selain itu, mengenai pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat berpendapat bahwa, kebanyakan program pelatihan yang ada kurang tepat sasaran dikarenakan tidak adanya keberlanjutan dari program tersebut, sehingga masyarakat kurang antusias dalam menyambut pelatihan-pelatihan tersebut. Masyarakat menginginkan bahwa, adanya keberlanjutan dari program pelatihan tersebut, misalnya penyediaan tempat usaha bagi masyarakat terdampak sehingga mereka tidak kebingungan mencari lokasi tempat usaha, mengingat lokasi di sekitar kecamatan Temon sekarang telah berkurang dengan adanya pembangunan tersebut, demikian juga untuk menemukan tempat usaha bukan hal yang mudah selain tempatnya yang harus strategis juga kendala mengenai harga tanah yang semakin mahal. Dengan demikian masyarakat

mengharapkan pemerintah menyediakan tempat untuk masyarakat dapat berwirausaha, sehingga mereka dapat merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut.

A. Saran

Berikut adalah saran dan harapan-harapan masyarakat kepada pemerintah terkait dengan adanya pembangunan bandara NYIA diantaranya:

- 1) Pemerintah harus memperhatikan tahapan dalam pengadaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya dalam kajian AMDAL mengingat hal ini merupakan hal yang wajib dalam menentukan kelayakan suatu lokasi proyek pembangunan.
- 2) Pemerintah diharapkan dapat memberdayakan masyarakat terdampak, misalnya memberikan tempat bagi mereka untuk berwirausaha, sehingga saat bandara telah selesai dibangun mereka dapat ikut merasakan mencari nafkah di lingkungan bandara.
- 3) Pemerintah diharapkan tetap memperhatikan baik tingkat kesejahteraan, kesehatan masyarakat, meskipun tahapan ganti rugi telah selesai dilakukan.
- 4) Pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan-pendampingan bagi masyarakat terdampak.

DAFTAR REFERENSI

- Mustafa lutfi, lutfi.j.kurniawan.2011.perihal Negara, hukm dan kebijakan public.Malang:setara press, (Hal:18-19)
- Davis.human relation at work dalam:(inu kencana syafiie.2010.ilmu administrasi public.Jakarta: Rineka Cipta)
- Salam,alfitra.2007.desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta: LIPI
- Lembong, Bernhard.2012.Konflik Pertanahan.Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri
- Maria.s.w.sumardjono.2007.kebijakan pertanahan (antara regulasi dan implementasi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Al Khanif.2016.Pancasila sebagai realitas (percik pemikiran tentang pancasila dan isu-isu kontemporer di Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rizky, fatahillah.lbhyogyakarta:pembangunan bandara untuk kepentingan siapa?.(29 Juni 2016).)
- Wirawan.2010.konflik dan manajemen konflik (teori, aplikasi dan penelitian).Jakarta:Salemba Humanika, (hal:7-8)
- Santoso kristva,nur sayyid.2015.kapitalisme Negara dan masyarakat.Yogyakarta:Pustaka Pelaja, Hal:107
- Kansil. Christine kansil.2008.hukum keuangan dan perbendaharaan Negara.Jakarta: PT. Pradya Paramita
- Yulius Hermawan, Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu,2007, hal 93
- Deutsch , morton, DKK.2016.handbook resolusi konflik.Bandung:Nuansa Media
- farma,sp.2010.teori politik modern.Jakarta:PT raja Grafindo Persada. Hal: 260-262
- Subarsono.2012. Analisa Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal:(26-30)
- Budiardjo, Miriam.2008.dasar-dasar ilmu politik.Jakarta: PT Gramedia pustaka utama

Nugroho,Riant.2009.Public policy (dinamika kebijakan-analisis kebijakan-manajemen kebijakan).Jakarta:PT Elex Media Komutindo. Hal(307-309)

Riduwan.2012.metode dan teknik menyusun proposal penelitian.Bandung:Alfabeta.

Arikanto, 2007.Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Jan, Jonker dkk. 2011. Metodologi penelitian. panduan untuk master dan Ph.D. Dikembangkan manajemen. 2011. Jakarta: Salemba Empat. hal, 71

Creswell,John.2013. penelitian kualitatif desain riset.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal(58-59)

Norman,k deniz, yvonna.s.lincoln.2009.handbook of qualitative research. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal: 496-499)

Sunyoto, Danang. 2011. metodologi penelitian ekonomi. Yogyakarta: CAPS, Hal. 143

Bungin, M. Burhan.2007.Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan Publik dan ilmu sosial. Jakarta: Kencana Prenada media group

Internet:

Dikutip pada tanggal 12 November 2016 Pukul :23.11WIB.diakses dari:
(<http://www.lbhyogyakarta.org/2016/06/rencana-pembangunan-bandara-untuk-kepentingan-siapa/>)

Persatuan pemuda anti dictator (Predator) kulon progo dalam:
<http://predatoryk.blogspot.co.id/2015/06/bandara-di-kawasan-pesisir-selatan.html>

Diunduh pada tanggal 30 november 2016 pukul 21.09 WIB

Rep: neni ridarineni/ Red: Budi Raharjo,2016.(Ground Breaking Bandara Baru di Kulon Progo Awal 2017).

Dalam:(<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/16/12/15/oi8cu9415-ground-breaking-bandara-baru-di-kulon-progo-awal-2017>) diunduh pada tanggal 1, Maret 2017. Pukul: 12.41WIB

Persatuan pemuda anti dictator (Predator) kulon progo dalam:
<http://predatoryk.blogspot.co.id/2015/06/bandara-di-kawasan-pesisir-selatan.html>

Diunduh pada tanggal 30 november 2016 pukul 22.00 WIB